

Pemberdayaan UMKM Dalam Menstabilkan Perekonomian Daerah Rejang Lebong di Tengah Pandemi Covid-19

Ranas Wijaya

Institut Agama Islam Negeri Curup

Correspondence: ranaswijaya@iaincurup.ac.id

Abstract

This paper aims to describe how efforts are made to empower Micro, Small, and Medium Enterprises (UMKM) in stabilizing the economy in the midst of the Covid-19 pandemic. The data used is sourced from data from the official website of several agencies or institutions that are relevant to this research. The results show that although the Covid-19 pandemic has created problems for UMKM and cooperatives, on the other hand, opportunities have also emerged. UMKM actors and cooperatives can take advantage of information and communication technology so that creativity and innovation emerge among UMKM in maintaining their business which has an impact on the optimal use of local or regional products. Local governments seek to empower UMKM in meeting community needs through skills development programs and funding assistance. The UMKM empowerment programs in the midst of the Covid-19 pandemic include changing business models from conventional to digitalization, designing social and digital strategies, developing and empowering UMKM resources optimally, and economic recovery programs in the form of capital assistance from the government.

Keywords: Covid-19, Empowerment UMKM, Stabilizing the Economy

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana upaya yang dilakukan untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam menstabilkan perekonomian di tengah pandemi Covid-19. Data yang digunakan bersumber dari data dari situs resmi beberapa instansi atau lembaga yang

relevan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pandemi Covid-19 telah menciptakan masalah bagi UMKM dan koperasi, di sisi lain, peluang juga telah muncul. Pelaku UMKM dan koperasi dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sehingga muncul kreativitas dan inovasi di kalangan UMKM dalam mempertahankan usahanya yang berdampak pada pemanfaatan produk lokal atau daerah secara optimal. Pemerintah daerah berupaya memberdayakan UMKM dalam memenuhi kebutuhan masyarakat melalui program pengembangan keterampilan dan bantuan pendanaan. Program pemberdayaan UMKM di tengah pandemi Covid-19 antara lain perubahan model bisnis dari konvensional ke digital, perancangan strategi sosial dan digital, pengembangan dan pemberdayaan sumber daya UMKM secara optimal dan program pemulihan ekonomi berupa bantuan modal dari pemerintah.

Kata Kunci: Covid-19, Pemberdayaan UMKM, Penstabilkan Ekonomi

Pendahuluan

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mempunyai peran penting dan strategis bagi stabilitas ekonomi daerah. Saat krisis ekonomi berlangsung di Indonesia, kemampuan UMKM untuk tetap bertahan di masa krisis ekonomi adalah bukti bahwa sektor UMKM merupakan bagian dari sektor usaha yang cukup tangguh (Dewi, 2020). Menurut Berry (1999) terdapat tiga alasan yang mendasari penting keberadaan UMKM, *pertama*, kinerja usaha mikro dan kecil cenderung lebih baik dalam hal menghasilkan tenaga kerja yang produktif. *Kedua*, sebagai bagian dari dinamikanya, UMKM sering mencapai peningkatan produktivitasnya melalui investasi dan perubahan teknologi. *Ketiga*, diyakini bahwa UMKM memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas ketimbang usaha besar.

Kebanyakan UMKM beroperasi berdasarkan pada kearifan lokal sehingga dapat memanfaatkan potensinya secara maksimal dalam memperkuat kemandirian. Masyarakat lokal akan merasa memiliki UMKM karena dilaksanakan dan dikembangkan oleh masyarakat lokal serta menerapkan teknologi lokal sehingga menjadi peluang besar bagi pengembangan UMKM dalam konteks pemberdayaan (Polman, 2000).

Meskipun dari sisi skala bisnis yang ditargetkan oleh UMKM masih relatif tidak sebesar perusahaan dengan skala besar, namun masih banyak

orang yang nyaman melakukan bisnis dalam skala ini karena keunggulan yang ditawarkan pada bisnis usaha mikro, kecil dan menengah serta keunggulan tersebut sulit didapatkan pada skala bisnis yang lebih besar. Salah satu keunggulan utama pada sektor UMKM adalah kemudahan dalam mengadopsi dan mengimplentasikan teknologi baru dan inovasi dalam bisnis untuk meningkatkan pertumbuhan dan daya saing bisnis UMKM karena tidak memiliki demokrasi yang rumit dan struktur organisasi masih relatif ramping sehingga koordinasi dan komunikasi antar managerial level cenderung mudah dilakukan. Selain kemudahan aplikasi teknologi, keunggulan lainnya yang dimiliki sektor UMKM adalah dalam hal menjaga hubungan baik antar karyawan, hal ini dikarenakan jumlah karyawan masih sedikit, dan yang terakhir adalah dalam hal fleksibilitas bisnis yang dapat lebih mudah untuk menyesuaikan bisnis dengan kondisi pasar yang dinamis (Putra, 2016).

Berdasarkan informasi yang ada pada website Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Bengkulu tahun 2019 jumlah UMKM di Rejang Lebong adalah sebanyak 235 UMKM. Diharapkan perhatian yang lebih kepada kondisi UMKM di Indonesia khususnya di Kabupaten Rejang Lebong, agar UMKM tersebut dapat terus bertumbuh kembang. Tuntutan untuk terus bertahan dan berkembang, maka UMKM tersebut harus mengetahui faktor-faktor UMKM berdaya saing yang akan mendukung perkembangan UMKM tersebut. Oleh karena itu perlu dirumuskan rencana strategi (renstra) bagi UMKM, baik bersifat teknis dan ekonomis yang dapat menciptakan UMKM berdaya saing di Indonesia khususnya Kabupaten Rejang Lebong (Oktoyoki, 2019).

UMKM memiliki potensi yang begitu besar namun kenyataanya UMKM masih mengalami berbagai hambatan, oleh karena itu hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu dan mengatasi permasalahan dalam UMKM sehingga hasil penelitian membawa dampak positif bagi pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi selanjutnya. Pemerintah dan sektor perbankan juga sangat penting terkait dengan segala hal mengenai pendanaan UMKM, terutama dari sisi pemberian pinjaman atau penetapan kebijakan. Peran dari para investor baik itu dari dalam maupun luar negeri, tidak dapat pula kita kesampingkan. Dalam pengembangan UKM para perilaku usaha tidak hanya bisa dilaksanakan

secara parsial, melainkan harus terintegrasi dengan pembangunan ekonomi nasional dan dilaksanakan secara berkesinambungan. Kebijakan ekonomi (terutama pengembangan dunia usaha) yang ditempuh selama ini belum menjadikan ikatan kuat bagi terciptanya keterkaitan antara usaha besar dan UKM. Pemerintah pada intinya memiliki kewajiban untuk turut memecahkan tiga hal yang menjadi masalah klasik yang kerap kali menerpa UKM, yakni akses pasar, modal, dan teknologi (Nuari, 2017).

Disaat duni mengalami sedang mengalami pandemi akibat penyebaran Covid-19 maka peran Negara sangat dibutuhkan dalam memberikan tindakan pengamanan masyarakat agar tidak menjadi korban dari pandemi ini. Indonesia juga merupakan salah satu Negara yang terkena dampak penyebaran virus Covid-19 yang kemudian telah memberikan beragam kebijakan ataupun himbawan seperti melakukan *social distance*, mencuci tangan, memakai masker, vaksinasi dan pengetatan aturan protocol kesehatan pada fasilitas dan layanan masyarakat, kondisi ini tentu akan memiliki dampak bagi UMKM dalam mempertahankan dan meningkatkan usahanya (Soetjipto, 2020). Dari sisi pemerintah sendiri, Kementerian Koperasi dan UMKM telah membuka layanan *hotline* 1500 587 yang ditujukan sebagai tempat aduan bagi UMKM yang usahanya terkena dampak pandemi Covid-19 ini mulai pertengahan Maret lalu. Pendataan ini kemudian menjadi acuan dari pemerintah untuk menyiapkan program-program antisipasi dampak Covid-19, antara lain mengajukan stimulus daya beli UMKM dan koperasi, program belanja di warung tetangga untuk menggerakkan ekonomi sekitar, restrukturisasi kredit bunga, memasukkan sektor mikro dalam program kartu prakerja, bantuan langsung tunai, hingga relaksasi pajak untuk UMKM. Dimana pemerintah berharap program ini bisa membantu koperasi dan UMKM bertahan di masa pandemi ini.

Meskipun pandemi Covid-19 memunculkan masalah bagi pelaku UMKM dan koperasi, tapi di sisi lain ada kesempatan dan peluang baru yang juga muncul. Pelaku UMKM dan koperasi bisa memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menjangkau lebih banyak konsumen, sehingga kreatifitas dan inovasipun bermunculan di kalangan UMKM dalam mempertahankan bisnisnya yang berdampak pada optimalnya pemanfaatan produk lokal atau daerah. Pemerintah daerah

berupaya memberdayakan UMKM dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui program pengembangan keterampilan dan bantuan pendanaan.

Beberapa penelitian terkait tentang hal ini juga sudah banyak dilakukan, salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Suprojo (2019) yang menyatakan bahwa pemerintah dalam menjalankan perannya bagi pengembangan UMKM dalam hal ini BUMDes desa Tlekung perlu didukung dengan ketersediaan sarana prasana, adanya kebijakan khusus mengenai pengurus, adanya pembinaan dan pengawasan, sedangkan untuk faktor penghambat yang dihadapi adalah minimnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pengembalian piutang, dan minimnya kemampuan pengurus dalam hal pembuatan laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan Rosita (2020) juga menyatakan bahwa Pandemi Corona (Covid-19) telah membuat banyak sektor terpuruk, termasuk sektor UMKM. Dampak covid-19 telah merusak rantai pasokan, penurunan kapasitas produksi, penutupan pabrik, hingga larangan bepergian sehingga perlu strategi berbagai pihak untuk membangkitkan UMKM agar bias survive ditengah pandemi covid-19 ini dan berusaha kembali stabil. Sedangkan Taufiqurrahman (2021) menyatakan, para pelaku UMKM tertarik untuk menggunakan digital marketing dan memanfaatkan media social, akan tetapi masih ada beberapa kendala yang mereka alami seperti kemampuan teknologi masih rendah, mereka menganggap bahwa untuk mempromosikan produk ke digital marketing melalui sosial media dan market place adalah hal yang menyusahkan/ribet, ketersediaan akses internet yang terbatas, masih banyak konsumen yang mengkhawatirkan keamanan bertransaksi secara online.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian sebelumnya adalah penelitian ini berkaitan dengan bagaimana UMKM bisa diberdayakan secara optimal dalam memenuhi kebutuhan terkhusus pada masyarakat Kabupaten Rejang Lebong ditengah pandemic Covid-19. Perbedaan lainnya juga terletak pada waktu, tempat dan objek penelitian, dengan demikian penelitian ini diberi judul: "Pemberdayaan UMKM dalam Menstabilkan Perekonomian Daerah Rejang Lebong Di Tengah Pandemi Covid-19".

Telaah Literatur

Pemberdayaan UMKM

Menurut UU No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM dijelaskan bahwa pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergi dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap UMKM sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang Tangguh dan mandiri. Adapaun Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.

Pemberdayaan UMKM diselenggarakan sebagai kesatuan dan pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Dengan dilandasi dengan asas kekeluargaan, upaya pemberdayaan UMKM merupakan bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Asas Kebersamaan adalah asas yang mendorong peran seluruh UMKM dan Dunia Usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Asas Efisiensi adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan UMKM dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdayasaing. Asas Berkelanjutan adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan UMKM yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri. Asas Berwawasan Lingkungan adalah asas pemberdayaan UMKM yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup. Asas Kemandirian adalah usaha pemberdayaan UMKM yang dilakukan dengan

tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian UMKM (UU No. 20/2008).

Stabilitas Ekonomi

Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani: oikos dan nomos. Oikos berarti rumah tangga *house-hold*, sedang nomos berarti mengatur. Maka secara garis besar ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga, atau manajemen rumah tangga. Kenyataannya, ekonomi bukan hanya berarti rumah tangga suatu keluarga, melainkan bisa berarti ekonomi suatu desa, kota, dan bahkan suatu negara (Fauziah dan Riyadi, 2015). Adapaun stabilitas perekonomian merupakan prasyarat dasar untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan yang tinggi dan peningkatan kualitas pertumbuhan. Perekonomian yang tidak stabil akan menyulitkan masyarakat, baik swasta maupun rumah tangga, untuk menyusun rencana kedepannya (Septiani, 2014).

Metode Penelitian

Adapun penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2017).

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder pada penelitian ini merupakan data dari website Badan Pusat Statistik Kabupaten Rejang Lebong dan data dari Gugus Covid-19 Provinsi Bengkulu. Adapun rentang waktu penelitian ini adalah mulai dari tahun 2020-2021.

Hasil dan Pembahasan

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1 dari Undang-undang

tersebut dinyatakan bahwa “usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang merupakan bukan anak perusahaan atau anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana yang dimaksud dalam UU tersebut. Sedangkan usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha mikro, usaha kecil atau usaha besar yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana yang dimaksud dalam UU tersebut.

Di dalam undang-undang tersebut, kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau aset tidak termasuk tanah dan bangunan, tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak RP. 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp300 juta
2. Usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp50 jt sampai dengan paling banyak Rp500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300 juta hingga maksimum Rp2.500.000
3. Usaha menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp500 juta hingga paling banyak Rp100 Myliar hasil penjualan tahunan diatas Rp2,5 milyar, sampai paling tinggi Rp50 milyar.”

Menurut Rasalawati (2001) “klasifikasi UMKM meliputi:

1. *Livelihood activities*, merupakan usaha mikro kecil dan menengah yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum biasa disebut sector informal. Contohnya pedagang kaki lima

2. *Micro enterprise*, merupakan usaha mikro kecil dan menengah yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan
3. *Small dynamic enterprise*, merupakan usaha mikro kecil dan menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor
4. *Fast moving enterprise*, merupakan usaha mikro kecil dan menengah yang memiliki jiwa kewirausahaan dan akan transformasi menjadi usaha besar (UB)".

Menurut Panji Anoraga (2002) diterangkan bahwa secara umum, sektor usaha memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Sistem pembukuan yang relatif administrasi pembukuan sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah administrasi pembukuan standar. Kadangkala pembukuan tidak di *up to date* sehingga sulit untuk menilai kerja usahanya.
2. Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi.
3. Modal terbatas.
4. Pengalaman menejerial dalam mengelola perusahaan masih sangat terbatas.
5. Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit mengharapakan untuk mampu menekan biaya mencapai titik efisien jangka panjang
6. Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diversifikasi pasar sangat terbatas
7. Kemampuan untuk sumber dana dari pasar modal terendah, mengingat keterbatasan salam administrasinya. Untuk mendapatkan dana di pasar modal, sebuah perusahaan harus mengikuti sistem admistrasi standard an harus transparan.

UMKM memiliki beberapa kekuatan potensial yang merupakan andalan yang menjadi basis pengembangan pada masa yang akan datang adalah:

1. Penyediaan lapangan kerja peran industry kecil dalam penyerapan tenaga kerja dapat diperhitungkan, diperkirakan maupun menyerap sampai dengan 50% tenaga kerja yang tersedia
2. Sumber wirausaha baru keberadaan usaha kecil dan menengah selama ini terbukti dapat mendukung tumbuh kembangnya wirausaha baru

3. Memiliki segmen usaha pasar yang unik, melaksanakan manajemen sederhana dan fleksibel terhadap perubahan pasar
4. Menunjukkan hasil yang menggambarkan bahwa industri kecil mampu untuk dikembangkan lebih lanjut dan mampu untuk mengembangkan sector lain yang terkait
5. Memiliki potensi untuk berkembang. Berbagai upaya pembinaan dari kelemahan yang sering menjadi faktor penghambat dan permasalahan dari usaha mikro terdiri dari dua faktor:
 - a. Faktor internal merupakan masalah klasik dalam UMKM yaitu diantaranya masih terbatasnya kemampuan sumber daya manusia, kendala pemasaran produk sebagian besar pengusaha industri kecil lebih memprioritaskan pada aspek produksi, sedangkan fungsi-fungsi pemasaran mampu dalam mengakseskannya, khususnya dalam informasi pasar, dan kecenderungan konsumen dalam mempercayai mutu produk industri kecil
 - b. Faktor eksternal merupakan factor yang muncul dari pihak pengembang dan Pembina UMKM. Misalnya solusi yang diberikan tidak tepat sasaran dan tidak adanya monitoring dan program yang tumpang tindih.

Perekonomian Daerah

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Jadi dalam pertumbuhan ekonomi ini sangat tergantung dengan output perkapita, dimana dalam hal ini ada dua hal yang harus diperhatikan yaitu output total dan jumlah penduduknya (Boediono, 1999). Menurut Sukirno (1991) "pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Dengan demikian untuk menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai perlu dihitung pendapatan nasional riil menurut harga tetap yaitu pada harga-harga yang berlaku ditahun dasar yang dipilih. Jadi pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian".

Menurut Wahyunti (2020) Faktor-faktor yang mempengaruhi ekonomi di era modern beragam. Ahli ekonomi menganggap faktor produksi sebagai kekuatan utama yang mempengaruhi pertumbuhan. Beberapa faktor produksi tersebut terdiri dari (Wahyunti, 2020):

1. Sumber Daya Alam merupakan faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi
2. Akumulasi Modal atau pembentukan modal adalah peningkatan stok modal dalam jangka waktu tertentu
3. Organisasi bersifat melengkapi (komplemen) modal, buruh, dan membantu meningkatkan produktivitas
4. Kemajuan Teknologi merupakan yang paling penting dalam pertumbuhan ekonomi yaitu untuk meningkatkan produktivitas, modal, dan faktor produksi lainnya.
5. Pembagian Kerja dan Skala Produksi, spesialisasi dan pembagian kerja menciptakan peningkatan produktivitas. Keduanya membawa ke arah ekonomi produksi skala besar, yang selanjutnya membantu perkembangan industry.

Menurut Arsyad (1999) Pengembangan metode untuk menganalisis suatu perekonomian suatu daerah penting sekali kegunaannya sebagai sarana mengumpulkan data tentang perekonomian daerah yang bersangkutan serta proses pertumbuhannya. Pengembangan metode analisis ini kemudian dapat dipakai sebagai pedoman untuk menentukan tindakan-tindakan apa yang harus diambil guna mempercepat laju pertumbuhan yang ada. Akan tetapi di pihak lain harus diakui, menganalisis perekonomian suatu daerah sangat sulit. Salah satu indikator untuk menunjukkan tingkat kemakmuran suatu daerah adalah data mengenai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga yang berlaku ataupun atas dasar harga konstan. Suatu masyarakat dipandang mengalami suatu pertumbuhan dalam kemakmuran masyarakat apabila pendapatan perkapita menurut harga atau pendapatan terus menerus bertambah". Adapaun data pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Rejang Lebong adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Perkembangan Pertumbuhan PDRB Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2011-2020 Berdasarkan Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

No	Tahun	PDRB (Jutaan Rupiah)	Kenaikan (Jutaan Rupiah)
1	2012	4.788.519,7	-
2	2013	5.344.368,4	555.848,7
3	2014	5.931.321,2	586.952,8
4	2015	6.575.854,9	644.533,7
5	2016	7.255.545,3	679.690,4
6	2017	7.946.952,8	691.407,5
7	2018	8.685.050,7	738.097,9
8	2019	9.368.975,7	683.925,0
9	2020	9.537.389,8	168.414,1
10	2021	10.091.527,9	554.138,1

Sumber: Data Badan Statistik Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021, data diolah.

Berdasarkan tabel di atas, nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Rejang Lebong atas dasar harga berlaku pada tahun 2021 mencapai 10,091 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 554,138 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 9,537 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di beberapa lapangan usaha dan adanya inflasi.

Tabel 2
Perkembangan Pertumbuhan PDRB Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2011-2020 Berdasarkan Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha

No	Tahun	PDRB (Jutaan Rupiah)	Pertumbuhan (Persen)
1	2012	4.261.234,7	6,60
2	2013	4.515.850,2	6,00

3	2014	4.755.015,1	5,30
4	2015	4.999.817,1	5,15
5	2016	5.259.987,9	5,20
6	2017	5.518.000,5	4,91
7	2018	5.791.952,0	4,96
8	2019	6.078.949,3	4,96
9	2020	6.083.033,9	0,07
10	2021	6.274.229,4	3,14

Sumber: Data Badan Statistik Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021, data diolah.

Berdasarkan tabel di atas, nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 juga mengalami kenaikan yaitu sebesar 191.195 miliar rupiah, atau mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 3,14 persen, mengalami pertumbuhan yang membaik dibandingkan tahun sebelumnya. Beragam asumsi muncul terait penyebab dari menurunnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rejang Lebong dibandingkan tahun 2019 termasuk kaitannya pandemi Covid 19 yang dimulai sejak tahun 2020.

Pandemi Covid-19

Perkembangan kasus covid-19 di Kabupaten Rejang Lebong selalu mengalami peningkatan, hingga 04 Agustus 2022 terkonfirmasi 2.769 kasus positif, 2.143 kasus sembuh, dan 25 kasus meninggal. Berikut data perkembangan kasus Covid 19 di Kabupaten Rejang Lebong:

Tabel 3
Perkembangan Kasus Covid 19 di Rejang Lebong

No	Waktu	Kasus Positif	Kasus Sembuh	Kasus Meninggal	Kasus Aktif
1	04-08-2020	3	2	0	1
2	31-12-2020	491	370	8	113
3	30-06-2021	1.206	958	15	233
4	04-08-2021	2.769	2.143	25	601

Sumber: <https://covid19.bengkuluprov.go.id>, data diolah.

Penulis menggunakan data dari 04 Agustus 2020 karena tampilan data pertama pada sumber yang penulis gunakan dimulai dari 04 Agustus 2020, sedangkan 04 Agustus 2021 karena menganalisis perkembangan setelah tepat 1 tahun. Berdasarkan data dari tabel di atas, menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kasus covid-19 dari tahun 2020 hingga 04 Agustus 2021. Data tersebut menunjukkan bahwa dalam waktu 1 tahun terkonfirmasi penambahan 2.766 kasus positif, 2.141 kasus sembuh, 25 kasus meninggal dan 600 kasus aktif.

Pemberdayaan UMKM

Proses pemberdayaan UMKM tidak jauh berbeda dari pemberdayaan masyarakat. UMKM sebagai suatu program harus tetap direncanakan secara serius dan lebih memfokuskan pada upaya-upaya yang membuat pelaku-pelaku usaha dapat lebih pandai dan mampu mengembangkan komunikasi antar mereka sehingga pada akhirnya mereka dapat saling berdiskusi secara konstruktif dan mengatasi permasalahan yang ada. Jadi, ketika agen pengubah, baik yang berasal dari lembaga pemerintahan atau non pemerintah telah menyelesaikan program pemberdayaan UMKM tersebut dan dapat terus berlangsung (Rifa'i, 2013).

Meskipun pandemi Covid-19 memunculkan beberapa masalah bagi pelaku UMKM di sisi lain ada kesempatan yang juga muncul. Pelaku UMKM harus bisa berkreatifitas dan berinovasi serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempertahankan bisnisnya dan sebagian lain berusaha untuk mengalihkan kegiatan bisnisnya ke jenis usaha lain agar tetap mendapatkan penghasilan. Para pelaku UMKM yang terdampak selama periode pandemi ini juga mengharapkan adanya bantuan dana/modal usaha, pemasaran produk, dan bantuan sembako/kebutuhan pokok serta alat-alat kesehatan seperti masker, *handsanitizer*, dan APD selama periode pandemi Covid-19 ini belum reda. Adapun program-program pemberdayaan UMKM di tengah pandemi covid-19 seperti sebagai berikut:

Perubahan Model Bisnis dari Konvensional Menjadi Digitalisasi

Strategi menggunakan teknologi digital dalam bisnis menyebabkan berubahnya cara melayani pelanggan. Meskipun teknologi

komputer telah ada selama beberapa dekade, namun konsep bisnis digital masih relatif baru dan bersifat memaksa para pelaku UMKM karena kondisi pandemi covid-19 sekarang ini (Rosita, 2020). Hal ini disebabkan kurangnya minat masyarakat untuk berbelanja secara konvensional meskipun fasilitas fisiknya sangat nyaman dan lengkap. Beragam kebijakan terkait pencegahan Covid-19 mengharuskan masyarakat mengurangi mobilitas ke luar rumah. Beberapa alasan orang tidak melakukan aktivitas belanja konvensional, diantaranya efektif dan efisien dalam hal waktu dan biaya, beragam pilihan dengan harga bersaing serta faktor kenyamanan dan pelaksanaan protocol kesehatan.

Merancang Strategi Sosial dan Digital

Mengembangkan strategi sosial dan digital menanggapi perubahan yang terjadi di pasar dengan menerapkan strategi digital yang tepat. Penetrasi pasar baru pasar digital, whatsapps, Facebook, instagram, Tiktok, telegram, youtube telah mengubah pasar menjadi lebih cerdas dan terinformasi dengan baik. Hal Ini merupakan penggerak perubahan yang memaksa perusahaan menjadi lebih sosial dan digital. Di sini pentingnya mencari informasi, pemasaran keluar dan masuk untuk mencapai keunggulan kompetitif (Rosita, 2020). UMKM harus mampu berinovasi dalam perubahan kondisi sosial dan digital akibat pandemic Covid-19 seperti lebih intensif dalam promosi melalui media sosial, *Cash On Delivery*, promo dan sebagainya.

Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya UMKM Secara Optimal

Menurut Sudaryanto (2013) Pengembangan dan pemberdayaan sumber daya UMKM meliputi. *Pertama*, penciptaan iklim usaha UMKM untuk memfasilitasi terselenggaranya lingkungan usaha yang efisien secara ekonomi, sehat dalam persaingan, dan nondiskriminatif bagi kelangsungan dan peningkatan kinerja usaha kecil menengah. *Kedua*, pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM yang bertujuan untuk mempermudah, memperlancar, dan memperluas akses UKM kepada sumberdaya produktif agar mampu memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan potensi sumber daya lokal serta menyesuaikan skala usahanya sesuai dengan tuntutan efisiensi. *Ketiga*, penegembangan

kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM yang ditujukan untuk mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan dan meningkatkan daya saing UKM, sehingga pengetahuan serta sikap wirausaha semakin berkembang dan produktivitas meningkat. Keempat, pemberdayaan usaha skala kecil yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi di sektor informal yang berskala usaha mikro, terutama yang masih berstatus keluarga miskin dalam rangka memperoleh pendapatan yang tetap, melalui upaya peningkatan kapasitas usaha, sehingga menjadi unit usaha yang lebih mandiri. *Kelima*, peningkatan kualitas kelembagaan koperasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi agar koperasi mampu tumbuh dan berkembang secara sehat.

Program Pemulihan Ekonomi Berupa Bantuan Modal dari Pemerintah

Pembuatan kebijakan program pemulihan ekonomi melalui penguatan modal usaha di masa pandemi sangat penting untuk keberlangsungan UMKM, dimasa pandemi daya beli masyarakat menjadi turun yang berakibat pada tidak lakunya produk UMKM. Kebijakan bersifat kolektif dan dapat dirasakan manfaatnya bagi UMKM dan masyarakat. Mengambil manfaat dari paket stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka menghadapi dampak penyebaran Covid-19, baik stimulus fiskal, stimulus nonfiskal, maupun stimulus sektor keuangan. Meskipun paket stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah saat ini masih jauh dari ideal, tetapi setidaknya dapat mengurangi beban yang harus ditanggung pelaku UMKM di tengah merebaknya Covid-19. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi agar tetap berjalan di tengah krisis ekonomi akibat wabah Covid-19 (Sumarni, 2020). Efektivitas program bantuan penguatan modal UMKM cukup baik dalam mendorong UMKM tetap bertahan dan berinovasi di masa pandemi Covid-19.

Kesimpulan

Meskipun pandemi Covid-19 memunculkan masalah bagi pelaku UMKM dan koperasi, di sisi lain, ada kesempatan yang juga muncul. Pelaku UMKM dan koperasi bisa memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sehingga kreatifitas dan inovasi pun bermunculan di

kalangan UMKM dalam mempertahankan bisnisnya yang berdampak pada optimalnya pemanfaatan produk lokal atau daerah. Pemerintah daerah berupaya memberdayakan UMKM dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui program pengembangan keterampilan dan bantuan pendanaan. Adapun program-program pemberdayaan UMKM di tengah pandemi covid 19 meliputi perubahan model bisnis dari konvensional menjadi digitalisasi, merancang strategi sosial dan digital, pengembangan dan pemberdayaan sumber daya UMKM secara optimal dan program pemulihan ekonomi berupa bantuan modal dari pemerintah.

Bibliografi

- Anoraga, Panji. 2002. *Kewirausahaan dan Usaha Kecil*. Jakarta: Rineka Cipta
- Arsyad, Lincolin. 1999. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: BPFE UGM
- Berry, A., Rodriquez, E. & Sandeem, H. 2001. *Small and medium enterprises dynamics in Indonesia*. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*,37(3),363-384.
- Boediono. 1999. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Dewi, Mega Arisia. 2020. *Pelatihan Etika Bisnis dan Pembukuan Sederhana Pelaku UMKM di Kelurahan Klampis Ngasem Surabaya*. *Jurnal Pangabdhi*. 6(2), 49-52
- Marlina, *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Rejang Lebong Menurut Lapangan Usaha 2016-2020, tahun 2021*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Rejang Lebong
- Nuari, Ahmad Raihan. 2017. *Pentingnya Usaha Kecil Menengah (UKM) untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*, *Osf.io*
- Polman W. 2000. *Policies and Institutional Infrastructure in The Promotion of Rural - Based Small Scale Industries*. Tokyo (JP) Asian Productivity Organization.
- Putra, Adnan Husada. 2016. *Peran UMKM dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Blora*. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 5(2): 40-52
- Oktoyoki, Hefri. 2019. *Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Agribisnis Berdaya Saing di Kabupaten Rejang Lebong*, *Jurnal Mapetari*, 4(1), 21-32
- Rasalawati Ade. 2001. *Pengaruh Perkembangan Usaha Kecil Menengah Terhadap pertumbuhan ekonomi Pada Sektor UKM Indonesia*. Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Syarifhidayatullah, Jakarta
- Rifa'I, Bachtiar. 2013. *Efektivitas Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan*

- Menengah (UMKM) Krupuk Ikan dalam Program Pengembangan Labsite Pemberdayaan Masyarakat Desa Kedung Rejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo, *Kebijakan dan Manajemen Publik*, 1(1), 130-136
- Riyadi, Abdul Kadir dan Ika Yunia Fauzia. 2015. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al Syariah* (Cet. II: Jakarta: Kencana)
- Rosita, Rahmi. 2020. Pengaruh pandemi Covid-19 terhadap UMKM di Indonesia. *Jurnal Lentera Bisnis*, 9(2): 109-120
- Soetjipto, HM. Noer. 2020. *ketahanan UMKM Jawa Timur Melintasi Pandemi Covid-19*, 2020. Yogyakarta: K-Media
- Sudaryanto.2013. Strategi Pemberdayaan UMKM Menghadapi Pasar Bebas Asean. Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal, Jakarta
- Sukirno, Sadono, 1985, *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*, Jakarta: LPFE UI
- Sumarni, Yenti. 2020. *Pandemi Covid-19: Tantangan Ekonomi dan Bisnis*. Al-Intaj, 6(2), 46-58
- Septiani, Pipit. 2014. *Pertumbuhan Ekonomi dan Kestabilan Politik di Indonesia*.
- Suprojo, Ferdi Harobu Ubi Laru Agung. 2019. Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 8(4): 367-371
- Taufiqurrahman. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Dunia Digital di Era Covid-19. *Etos: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1): 20-29
- Wahyunti, Sri. 2020. *Peran Strategis UMKM dalam Menopang Perekonomian Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19*. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2), 280-302
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan menengah
<https://covid19.bengkuluprov.go.id>